

Judul : Perasaan orang Golkar, duduk di Banggar ngeri-ngeri sedap
Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Perasaan Orang Golkar Duduk Di Banggar Ngeri-ngeri Sedap

DUDUK manis di Badan Anggaran DPR ternyata tidak senyaman yang dipikirkan banyak kalangan. Salah sedikit, bisa bisa terseret kasus hukum. Kondisi ini yang sangat dirasakan anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman.

Kendati merupakan pendatang baru di Banggar, dia merasa duduk di Banggar terbilang ngeri. Dia pun menanti-wanti agar setiap detail pembahasan anggaran dibahas setransparan mungkin. Dia tidak ingin bernasib sama seperti anggota-anggota Banggar lalu yang bolak-balik memenuhi panggilan hukum.

"Terus terang saya rada ngeri-ngeri sedap ditaruh di Banggar karena sensitivitas keberadaan kita luar biasa di sini. Apalagi tadi pimpinan Banggar sampaikan forum rapat di Banggar jadi satu-satunya forum resmi mengambil keputusan. Jangan sampai ada masalah kemudian berimplikasi ke kita (Dewan). Jadi forum (Rapat Banggar) ini satu-satunya forum mengambil keputusan agar jangan sampai ada bias dan hal-hal yang tidak diinginkan," katanya dalam rapat pembahasan RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Maman mengaku baru kali ini mendapat pengusutan di Banggar. Karena itu, dia memastikan tidak tahu persis bagaimana detail pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR di forum tersebut.

"Ruang ini (Forum Banggar, red) saya tidak tahu karena saya tidak paham ini sejenis binatang apa ini karena saya pendatang baru. Keberadaan saya bisa jadi ukuran, ini niatnya apa dan untuk apa kita tidak paham," jelasnya.

Dia merasa hal yang paling utama yang harus di garisbawahi dalam pembahasan anggaran di Banggar adalah pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal.

"Ini harus jadi catatan besar untuk kita semua. Dari angka cukup signifikan dan fantastis tapi outputnya di bawah (manfaatnya ke masyarakat) tidak sefantastis yang kita alokasikan," kata Maman.

Menurutnya, salah satu

penyebabnya karena adanya kebijakan Kemenkeu yang setiap tahunnya memangkas anggaran belanja untuk DPR. Dia mendapati alokasi belanja untuk kegiatan di DPR cukup signifikan sehingga dampaknya sangat dirasakan bagi para Anggota Dewan di daerah utamanya di daerah pemilihan. DPR merasa pemotongan anggaran tersebut mengganggu kegiatan para dewan dalam menyerap aspirasi di masyarakat.

"Padahal realitas yang paham masalah di daerah adalah kita. Seakan-akan ada pertanyaan bahwa ada sedikit ruang dari aspirasi para anggota dewan. Ruang aspirasi itu harus terbuka. Artinya, sinergi data kita dengan bapak (pemerintah) menjadi penting. Suka atau tidak suka realitas fakta kita yang paling paham realitas di lapangan," katanya.

Lebih lanjut, Maman menuturkan setidaknya ada tiga poin yang harus jadi pemikiran bersama antara pemerintah dengan DPR. Pertama, harus dibuka ruang aspirasi bagi para Anggota Dewan untuk masuk dalam pembahasan ini.

Kedua, sambung dia, tidak boleh ada rapat lagi pembahasan anggaran di luar forum resmi yang dibahas di Banggar. Ketiga, masing-masing kementerian/lembaga juga harus bijak dalam pengelolaan anggaran jangan sampai alokasi anggaran sudah dikorbankan untuk sektor lainnya, namun pemerintah tidak bijak dalam pengelolaannya.

Anggota Banggar Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menegaskan, pihaknya mendukung setiap upaya pemerintah untuk memahami dan memberikan ruang mekanisme terhadap usulan aspirasi anggota dewan. Karena itu dia meminta agar setiap rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah (RKA dan RKP) dibuka setransparan mungkin.

Yang sering disorot, kata dia, terkait insentif bagi kepala desa untuk pengelolaan dana desa. Sebab, tak sedikit kepala desa mengeluhkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa namun tidak diberi insentif sepersen pun. ■ KAL